

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil perhitungan standar belanja yang dilakukan pada 7 program dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat 6 diantaranya yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kondisi *underfinance* dan pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa diketahui dalam kondisi wajar.
2. Berdasarkan hasil di atas adapun selisih pada program/kegiatan yang dilakukan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang selisihnya paling sedikit yaitu sebesar Rp 12.813.711 kemudian diikuti oleh Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran selisihnya sebesar Rp 98.938.183. Kemudian, pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selisihnya sebesar 104.893.281 dan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selisihnya sebesar Rp 161.857.400. Selanjutnya, Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran kembali terjadi selisih sebesar Rp 204.386.971 dan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terjadi selisih yang paling besar yaitu sebesar Rp 696.493.159.

3. Dari hasil perhitungan standar belanja diketahui terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penerapan standar belanja tersebut antara lain yang pertama ialah kemampuan perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan namun tidak adanya peninjauan kembali sehingga kuantitas dan spesifikasi menjadi pertimbangan dalam kegiatan belanja. Kedua, lingkungan kerja yang masih sulit untuk melakukan inovasi sebagai langkah pertanggungjawaban terhadap publik dan yang ketiga berkaitan dengan sanksi bahwa tidak adanya sanksi tegas berupa peraturan pelanggaran apabila penyusunan penganggarannya diketahui tidak sesuai dengan ketentuan standar belanja yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti melalui hasil penelitian ini yaitu:

6.2.1 Bagi Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang

1. Bagi Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang dianjurkan untuk selalu berpedoman pada standar biaya dalam menganalisis dan meminimalisir anggaran pada setiap objek belanja agar perencanaan dan penyusunan penganggaran pada masa mendatang kinerjanya terukur.

2. Perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas setiap kebutuhan yang diajukan oleh unit kerja begitupun dalam rangka meningkatkan kinerja maka diperlukan penyesuaian antar unit kerja agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam menunjang pelayanan kepada anggota DPRD Kota Kupang.

6.2.2 Bagi Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah juga perlu membuat peraturan terkait dengan sanksi apabila instansi tidak menerapkan standar belanja yang telah ditetapkan.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian sejenis pada instansi pemerintah daerah lainnya agar dapat membandingkan penerapan standar belanja sehingga manfaat dari penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi upaya perbaikan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Geraha Ilmu.
- Anggita, Wenni. 2017. *Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang)*. Vol. 2, No. 01. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.
- Ayu, Maristiana. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kualitas SDM, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung). *KOMBIS Sains – Vol. 02 No. 02 Desember 2017*. Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bramantya, Tattuk, Andreas. 2011. *Penyusunan Model Analisis Standar Belanja (ASB) Untuk Progam Pendidikan Dan Pelatihan(Diklat) di Kabupaten Boyolali*. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Djefris, Dedy., Rosalina, Eka., Rasyidah., Ahmad, Wirahadi, Afridian., Misra, Fauzan., dan Putri, Eka, Angrama, Jane. 2021. *Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman*. Vol. 16, No. 2, (2021): Hal. 50-67. Jurusan Akuntansi. Sumatera Barat: Politeknik Negeri Padang. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Kajian terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gama Press.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Hermawan, Erry. 2011. *Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan–Sekretariat Negara RI*. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hidayati, Rizka. 2020. *Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*. Program Magister Ilmu Administrasi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Kuntadi, Cris dan Velayati, Ema. 2022. Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Volume 5, Nomor 4, 2022.
- Maharshiyam, Sulaiman. 2014. *Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Kota Malang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyono, N. R. T. Talita. 2014. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yogyakarta*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mustafa, Amrain. 2015. *Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Volume II, Nomor 2 Desember 2015. Gorontalo: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo.
- Nas, Ulfah., Su'un, Muhammad, dan Nasaruddin, Fadliah. 2020. *Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai*. *Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya*. Volume 3, No. 2: 76-82. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Oktaria, Benny. 2011. *Analisis Kendala-Kendala Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) (Studi Kasus pada Kabupaten Katingan-Kalimantan Tengah)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik. 2009. *Penyusunan Analisis Standar Belanja Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Putra, Prasana, Rahadiyan. 2012. *Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010*. Tesis. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Prameswari, Mesa. 2016. *Evaluasi Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Magister Science di Bidang Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Sumatera Barat: Universitas Andalas.
- Ritonga, Taufiq, Irwan. 2010. *Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode, Pengembangan dan Implementasi di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Robinson, Marc dan D. Last. 2006. *A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals*. Washington: International Monetary Fund.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIE YPKN.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV Bandung.
- Tanjung, Abdul, Hafiz. 2010. *Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan APBD*. Makalah saat Bimtek Penyusunan Standar Biaya di Kabupaten Pelalawan.
- Yuwono, Sony, et. al. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zulkarnain, Akhmad. 2013. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi)*. Program Pasca Sarjana. Jakarta: Universitas Terbuka.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar
Belanja

C. Website

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/> diunggah pada 12 September 2016 pukul
17.00 WIB